

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Bencana banjir ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu curah hujan yang terlalu tinggi, kurangnya daerah resapan air, dan meluapnya air sungai. Bencana banjir ini sangat mengganggu pada kehidupan masyarakat karena menyebabkan mereka terhambat beraktifitas dan bekerja. Selain itu juga dapat menyebab kerugian karena kerusakan pada barang-barang dan mengancam kesehatan masyarakat.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di suatu daerah adalah dengan cara pembuatan drainase di tempat-tempat yang sering terjadi banjir dan genangan air. Drainase ini merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan dengan tujuan untuk mengelola atau mengendalikan air permukaan dan mencegah terjadinya bencana banjir, sehingga tidak mengganggu dan merugikan masyarakat. berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa drainase adalah salah satu aspek yang penting di suatu daerah atau kawasan untuk bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat di kawasan tersebut. Oleh karena itu drainase ini perlu diberikan perhatian dalam pengelolaannya bagi pemerintah di daerah atau kawasan tersebut.

Bentuk pengelolaan drainase tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 diantaranya yaitu¹:

1. Pengaturan

- a) Menetapkan peraturan, kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional provinsi.
- b) Menetapkan peraturan daerah mengenai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

2. Pembinaan

- a) Meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten/kota.

3. Pembangunan

- a) Menyelesaikan masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan daerah sekitarnya.
- b) Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.
- c) Menyusun rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.

4. Pengawasan

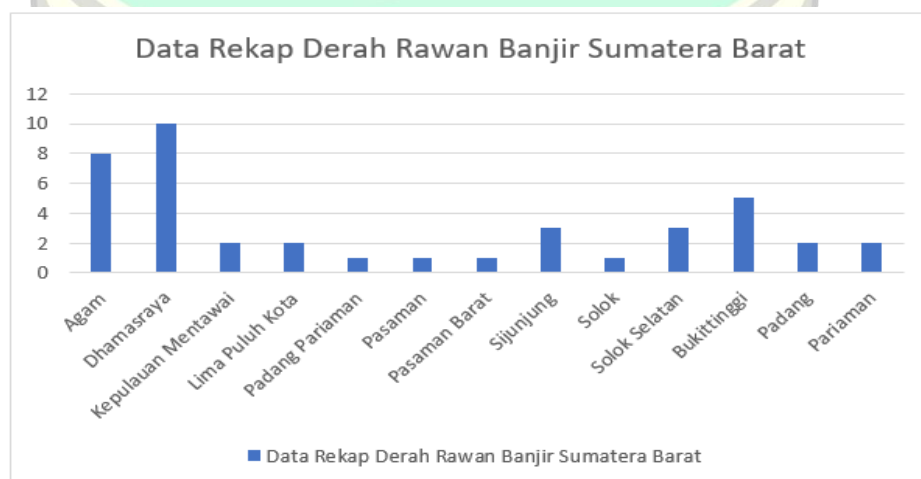
- a) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah kabupaten/kota.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota.

- b) Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.
- c) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Buruknya sistem drainase ini disuatu kawasan akan mempengaruhi angka kejadian banjir di kawasan tersebut, seperti yang dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif (2019) yang mengatakan bahwa daerah yang berpotensi rawan bencana banjir di Sumatera Barat adalah daerah-daerah yang sistem drainase dan daerah resapan airnya terganggu, daerah-daerah tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Agam.² Diantara daerah-daerah tersebut Kabupaten Agam merupakan daerah dengan angka kejadian banjir paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Data Rekap Daerah Rawan Banjir Sumatera Barat 2018



Sumber : penelitian dari Arif 2019

² Arif, M. (2019). Analisis Wilayah Berpotensi Banjir Daerah Sumatera Barat Untuk Pelaksanaan Pembelajaran Georafi Berorientasi Bencana Alam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 4 (1)

Gambar 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Agam merupakan daerah yang paling rawan banjir ke dua di Sumatera Barat setelah Kabupaten Dharmasraya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Penyebab tingginya angka kejadian banjir di Kabupaten Agam ini adalah karena buruknya kondisi drainase di daerah tersebut dan hal ini ditegaskan kembali oleh anggota bagian Pusdalop (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam, dimana beliau mengatakan bahwa :

“Penyebab banjir yang paling banyak terjadi di Kabupaten Agam di sebabkan oleh saluran irigasi dan drainase yang tersumbat karena banyaknya sampah.” (Wawancara dengan anggota bagian Pusdalop BPBD Kabupaten Agam, pada 22 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut sebagian banjir yang terjadi di Kabupaten Agam disebabkan oleh banyaknya drainase yang tersumbat oleh sampah, hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Agam yang belum mempunyai program untuk kegiatan pemeliharaan drainase seperti pengerukan sampah dan sedimen. Sehingga hal ini menyebabkan banyak drainase yang sudah terbangun di Kabupaten Agam yang tersumbat karena dipenuhi oleh sedimen dan sampah sehingga menyebabkan air meluap. Seperti yang terjadi Pada tahun 2020, pada tahun ini terjadi banjir di Kecamatan Lubuk Basung yang diakibatkan sistem drainase yang buruk dimana banyak saluran yang tersumbat lumpur, sampah, dan lalu lalang jaringan utilitas yang tumpang tindih dan tidak terhubung dengan baik antar saluran, sehingga saluran tidak mampu menampung luapan air hujan.³

³ Dika.(2020). “Di Duga Kurangnya Perawatan Drainase Jalan Kota Lubuk Basung Banjir”, *Sidak Nusantara* 31 Agustus 2021 (<https://www.sidaknusantara.com/2020/08/31/di-duga-kurang-nya-perawatan-drenase-jalan-kota-lubuk-basung-banjir/>)

Hal yang sama juga terjadi di Koto Panjang, Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang drainasenya jebol dikarenakan drainase yang sudah dangkal ditambah dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan drainase tidak kuat menahan volume air yang cukup besar.⁴ Penyebab belum terdapatnya program pemeliharaan drainase ini di Kabupaten Agam yaitu Seperti yang dijelaskan oleh Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase DPUTR Kabupaten Agam berikut :

“Selama ini belum ada dilakukan kegiatan pemeliharaan drainase karena belum dianggarkan, kami hanya turun ke lapangan saat melakukan pembangunan dan saat terjadi masalah pada drainase” (Wawancara dengan Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, pada 13 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penyebab belum adanya program pemeliharaan drainase di Kabupaten Agam adalah karena belum adanya anggaran untuk program tersebut. Selain kurangnya anggaran terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Agam diantaranya yaitu, yang pertama kurangnya perhatian terhadap permasalahan mengenai drainase yang terjadi, seperti yang di ungkapkan oleh Kasi PSU Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan yang mengatakan bahwa :

“Selama ini permasalahan banjir karena drainase ini tidak terlalu diperhatikan karena tidak menyebabkan adanya korban jiwa dan kerugian” (Wawancara dengan Kasi PSU Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Perumahan, pada 19 Oktober 2021)

⁴ Hanum, N.(2021).”Drainase Jebol, Air Meluap Genangi Rumah Warga Canduang Agam” *Langgam* 10 Agustus 2021 (<https://langgam.id/drainase-jebol-air-meluap-genangi-rumah-warga-canduang-agam/>)

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak adanya penanganan dari pemerintah padahal permasalahan drainase ini sudah sangat mengganggu aktifitas mereka. Seperti yang terjadi di pasar Impres Kecamatan Lubuk Basung, drainase di pasar tersebut tersumbat akibat sampah sehingga menyebabkan toko bagian barat pasar terendam, sehingga akibatnya jumlah konsumen yang berbelanja ke pasar jadi berkurang.⁵

Kedua, tidak adanya respon dari pemerintah terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan drainase yang terjadi, seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung yang mengatakan bahwa :

“Kami sudah sering menyampaikan masalah drainase ini melalui RT, tapi sampai sekarang masih belum ada penanganan dari pemerintah. Padahal kondisi drainase disini sudah sangat parah, banjir terjadi hampir setiap musim hujan, dan bahkan saat cuaca panas pun air masih tergenang di jalan”
(Wawancara dengan masyarakat Nagari Lubuk Basung, pada 25 Januari 2022)

Ketiga, pemerintah Kabupaten Agam yang masih belum mempunyai masterplan dalam pengelolaan drainase, hal ini menyebabkan pengelolaan drainase selama ini tidak bisa terlaksana secara maksimal. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu staf bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam yang mengatakan bahwa :

“Selama ini capaian kinerja drainase memang belum terlalu memuaskan karena salah satu penyebabnya adalah karena masterplan yang belum ada”
(Wawancara dengan Staf Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Agam, pada 13 Oktober 2021)

⁵ Indrawati, N. (2015). “Drainase di Pasar Impres Lubuk Basung Sering Tersumbat Akibat Sampah”, *Padang Media* 30 November 2015 (<https://padangmedia.com/drainase-di-pasar-inpres-lubuk-basung-sering-tersumbat-akibat-sampah/>)

Keempat, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan instansi terkait. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lubuk Basung, dimana proyek drainase yang dilakukan menyebabkan infrastruktur PDAM Agam rusak yang disebabkan karena DPUTR Kabupaten Agam yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PDAM Agam sebelum melaksanakan pembangunan.⁶

Kelima, kurang tegasnya peraturan terkait drainase yang menyebabkan semakin buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam. Sehingga hal ini menyebabkan, perilaku masyarakat seperti membuang sampah ke saluran drainase, mendirikan bangunan di atas saluran, dan menghalang-halangi saluran untuk pemeliharaan ikan memperparah kondisi drainase di Kabupaten Agam tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase :

“Perilaku masyarakat adalah salah satu penyebab seringkali terjadi banjir di Kabupaten Agam seperti membuang sampah ke jaringan drainase.”
(Wawancara dengan Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, pada 13 Oktober 2021)

Hal ini pernah terjadi Pada tahun 2018 sekitar 18 rumah di Jorong Sungai Buluh Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu terendam banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan kapasitas drainase yang sudah tidak bisa menampung curah hujan lagi. Kondisi ini disebabkan karena selain ukurannya yang kecil, permukaan drainase juga sudah dipenuhi sedimen yang sulit dibersihkan karena tertutup oleh rumah yang dibangun di atasnya.⁷

⁶ PDAM Agam.(2018). “Infrastruktur PDAM Rusak Akibat Proyek Drainase”, *PDAM Agam* 20 Maret 2018 (<http://pdamagam.co.id/berita/infrastruktur-pdam-rusak-akibat-proyek-drainase>)

⁷ Utoyo, J.(2018). “Banjir di Sungai Buluh Agam, Debit Air Kiriman Daerah Sekitar Tidak Tertampung Lagi Oleh Drainase”, *Covesia* 21 Mei 2018 (<https://covesia.com/archipelago/53771/banjir-di-sungai-buluh-agam-debit-air-kiriman-daerah-sekitar-tidak-tertampung-lagi-oleh-drainase/>)

Keenam, laporan akuntabilitas kinerja DPUTR Kabupaten Agam pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 memperlihatkan bahwa kinerja DPUTR Kabupaten Agam dalam program pengelolaan drainase mengalami penurunan.⁸ Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan drainase ini menyebabkan Buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam dimana kondisi drainase di Kabupaten ini Agam ini menurut Kasi PSU Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan yaitu :

“Kadang-kadang saat hujan, air hujan tidak tertampung ke saluran sehingga meluap ke jalan, yang disebabkan oleh dimensi saluran drainase yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan, budaya buang sampah ke saluran oleh masyarakat, dan ada sebagian saluran yang telah dibuat ditanggalkan untuk pemeliharaan ikan keramba oleh masyarakat.” (Wawancara bersama Kasi PSU Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan, pada 19 Oktober 2021)

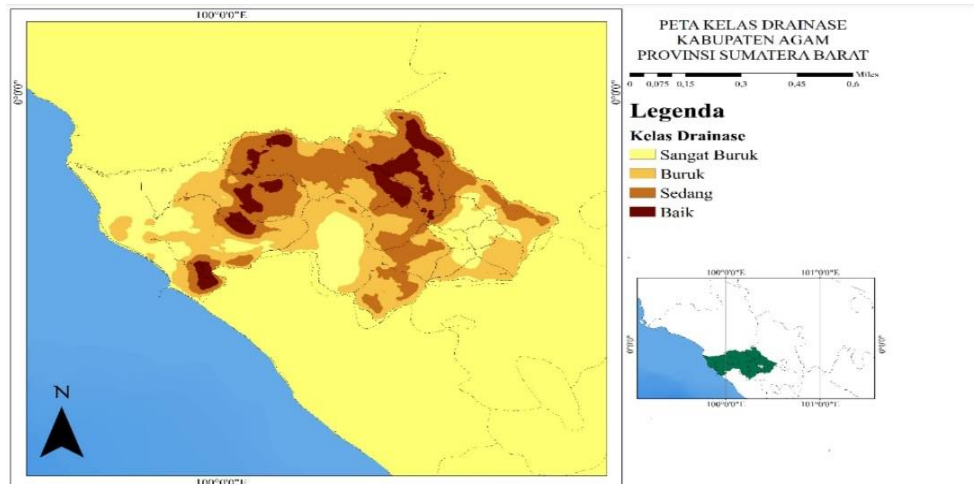
Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa drainase yang ada di Kabupaten Agam tidak mampu menampung air hujan karena dimensi saluran yang belum sesuai dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran dan menghalangi saluran untuk pemeliharaan ikan. Selain itu buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini dapat dilihat pada peta kelas drainase yang dibagi menjadi beberapa kriteria seperti berikut :

1. Baik : saluran pembuangan atau drainase terbuat dari batu/semen dan aliran air lancar
2. Sedang : Saluran pembuangan atau drainase terbuat dari batu/semn dan aliran cukup lancar
3. Buruk : saluran pembuangan atau drainase terbuat dari batu kosong dan aliran kurang lancar

⁸ Laporan Akuntabilitas Kinerja DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2018-2020

4. Sangat Buruk : saluran pembuangan atau drainase terbuat dari tanah dan aliran kurang lancar

Gambar 1.2
Peta Kelas Drainase Kabupaten Agam 2020



Sumber : Penelitian Septian dkk 2020

Berdasarkan peta tersebut sekitar 20% drainase berada dalam kondisi sangat buruk, 47% drainase dalam kondisi buruk, 21% drainase dalam kondisi sedang, dan hanya 12% drainase berada dalam kondisi baik.⁹ Buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini berpengaruh terhadap angka kejadian banjir di daerah tersebut dimana berdasarkan data rekap bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam pada tahun 2019 dan tahun 2020, dalam dua tahun sudah terdapat empat puluh kasus banjir yang terjadi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

⁹ Ibid (hal 17)

Tabel 1. 1
Rekap Kejadian Banjir Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	Tahun		Jumlah
	2019	2020	
Tanjung Mutiara	2	5	7
Lubuk Basung	1	9	10
Ampek Nagari	-	7	7
Tanjung Raya	8	1	9
Matur	-	-	-
IV Koto	-	-	-
Malalak	-	-	-
Banuhampu	-	1	1
Sungai Pua	-	-	-
Ampek Angkek	-	-	-
Canduang	-	1	1
Baso	1	-	1
Tilatang Kamang	-	-	-
Kamang Magek	1	-	1
Palembayan	1	1	2
Palupuh	2	-	2
Jumlah	16	24	40

Sumber : Data Olahan Peneliti (BPBD-DAMKAR Kabupaten Agam 2021)

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini, perlu adanya perhatian terhadap kinerja terhadap instansi yang bertugas dalam pengelolaan drainase tersebut. Karena pada dasarnya menurut Kelly dan Swindel dalam konteks pemerintahan lokal, kinerja merupakan suatu indikator penting terhadap kemajuan pencapaian misi organisasi secara keseluruhan dan dapat dilihat sebagai ukuran internal bagi organisasi atas usaha dan pencapaian pelayanan pada masyarakat.¹⁰ Selain itu kinerja dalam sebuah organisasi publik digunakan sebagai alat untuk evaluasi diri bagi organisasi tersebut untuk bisa digunakan sebagai dasar penyusunan strategi organisasi yang akan membantu

¹⁰ Ishak, D, Maolani, D, Y, Engkus. (2017). Konsep Kinerja dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO*, 7(2)

organisasi dalam mengelola pelayanan dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai yang mereka butuhkan.¹¹

Instansi yang berwenang dalam pengelolaan drainase ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjelaskan bahwa penyelenggaraan drainase perkotaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai kewenangannya masing-masing, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan drainase tersebut dilakukan oleh instansi teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam sub bidang drainase dimana instansi yang dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 51 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas dan fungsi dalam:

- 1) Melaksanakan penetapan peraturan daerah nilai standar pokok kegiatan drainase dan pemantauan genangan berdasarkan standar prosedur manual yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
- 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan.
- 3) Menyelesaikan masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan melakukan penanggulangan banjir serta berkoordinasi dengan daerah sekitarnya.

¹¹ Wirmipin, K, S, Adiputra, M, P, Yuniarta, G, A.(2015).Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1)

- 4) Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase.
- 5) Menyusun rencana induk mengenai prasarana dan sarana drainase.
- 6) mengevaluasi penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir.
- 7) Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir.¹²

Berdasarkan tupoksi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan drainase DPUTR memiliki peran mulai dari penetapan peraturan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Hal ini sesuai dengan konsep pengelolaan menurut Boedijono dkk yang mengartikan pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan hingga selesai untuk mencapai suatu tujuan. Dimana pelaksanaannya di DPUTR Kabupaten Agam seperti yang dijelaskan oleh Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“Saat kami menerima usulan dari masyarakat melalui Wali Nagari, kami akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan, setelah itu usulan tersebut akan di usulkan lagi pada renja PU, renja tersebut akan diajukan ke BAPEDA untuk dimasukkan dalam RKPD, dari RKPD tersebut akan dipilih agenda prioritas, setelah prioritas dipilih akan dibuat dokumen pelaksanaan anggaran, baru setelahnya kegiatan pengelolaan dilaksanakan, terakhir akan dilakukan evaluasi secara bertingkat mulai dari Kabid lalu ke Kasi” (Wawancara dengan Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, pada 26 Oktober 2021)

¹² Peraturan Bupati Agam Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Berdasarkan tupoksi tersebut maka dibuatlah sebuah program, dimana program tersebut seperti yang dapat dilihat pada tabel Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam berikut :

Tabel 1. 2

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
		Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
		Pembangunan gedung kantor (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jembatan
		Pembangunan jembatan (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
4	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
		Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
		Peningkatan Jalan 1
		Peningkatan Jalan 2
		Peningkatan Jalan 3
		Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Reguler)
		Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
		Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi/Pengairan (DAK

		Penugasan) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi)
8	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Penyediaan Sarana dan prasarana Air Minum dan Air Limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Penugasan) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
9	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi)
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
14	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Sumber : Data Olahan peneliti (Lakip DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2018)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 hanya terdapat satu program yang berhubungan dengan drainase yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan satu kegiatan kegiatan yaitu Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
		Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2		Pembangunan Rumah Jabatan

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
3	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
4	Program Pembinaan Jasa konstruksi	Penyusunan NSPM dan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
		Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan
6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
		Peningkatan Jalan
		Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Reguler)
		Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Reguler)
8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
9	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi/Pengairan (DAK Penugasan)
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
		Irigasi Berbasis Masyarakat
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
11	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
13	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Sumber : Data Olahan peneliti (Lakip DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2019)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 juga hanya terdapat satu program yang berhubungan dengan drainase yaitu Program

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan satu kegiatan yaitu Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Tabel 1. 4

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
		Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
3	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
		Rehabilitas/ pemeliharaan jembatan
		Peningkatan Jalan
		Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Reguler)
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi/Pengairan (DAK Penugasan)
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK Reguler)
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
13	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Sumber : Data Olahan peneliti (Lakip DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sama dengan dua tahun sebelumnya dimana hanya terdapat satu program yang berhubungan dengan drainase yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan satu kegiatan kegiatan yaitu Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Tabel 1. 5

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
		Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor
3	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
		Rehabilitas/ pemeliharaan jembatan
		Peningkatan Jalan
		Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
		Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK Reguler)
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi/Pengairan (DAK Penugasan)
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK Reguler)
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

13	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
----	---------------------------	---

Sumber : Data Olahan peneliti (Lakip DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana hanya terdapat satu program yang berhubungan dengan drainase yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan satu kegiatan kegiatan yaitu Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa bentuk pengelolaan drainase yang dilakukan oleh DPUTR Kabupaten Agam yaitu berupa Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong program ini memiliki satu kegiatan yaitu pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dalam kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu kegiatan pembangunan saluran drainase, kegiatan perbaikan saluran, kegiatan pembangunan trotoar.¹³ Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Tabel 1. 6
Data Drainase Kabupaten Agam

Kecamatan	Drainase
Tanjung Mutiara	Drainase Nagari Tiku Selatan
	Drainase Pasa Tiku V Jorong
Lubuk Basung	Drainase Jalan Koto Padang Baru
	Drainase Jalan Cindua Mato –Stingkah Tapi – Batu Palano
	Drainase Jalan M. Safei
	Drainase Jalan Simpang BK
	Trotoar Simpang Surau Kariang – Sport Center
	Drainase Pasar Inpres Padang Baru Nagari Lubuk Basung

¹³ Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Agam 2019

	Drainase Padang Baru Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung
	Drainase Siguhung Dama Sikuciang Nagari Lubuk Basung
Ampek Nagari	Drainase Simpang Pudung Jati – MTS Swasta Bawan Jorong Pudung Nagari Bawan
Tanjung Raya	Drainase Depan MTSM Sungai Batang Tanjung Raya, Batang Panjang Nagari Sel. Batang
	Drainase Pasar Maninjau – Jorong Kukuban
Matur	Drainase Pasar Serikat Matua
	Drainase Pasar Serikat Lawang Tigo Balai
	Drainase Pasar Nagari Matua Mudiak
IV Koto	Drainase Gantiang Ranah
	Drainase Simpang 3 Ranah Nagari Sungai Landia
	Drainase Lurah Galudua
	Gorong-gorong Jalan Guguak Randah
	Drainase Kampuang Ateh Paniang
Banuhampu	Drainase Simpang Durian – Salimpariak
	Drainase Jalan Pakan Ahad – Buah Pauh
	Trotoar Simpang Gobah Nagari Ladang Laweh
	Drainase Banda Saiyo Jorong Koto Batu Nagari Taluak IV Suku
Sungai Pua	Drainase Simpang Padang Banyak Ampangan Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua
Ampek Angkek	Drainase Jalan Pitali- Jalan Simber Raya
	Drainase Jalan Simpang Masin – Sungai Rotan
	Drainase Simpang Bali Batu Taba – Simpang Sungai Rotan
	Drainase Ladang Lubuak – Simpang 3 Jorong Simpang Mangkuto
	Drainase Simpang Masin Panca – T. Nyariang
	Drainase Ampang Gadang Mushola Kuntun Nagari Ampek Angkak
Canduang	Drainase Paniang-Paniang Koto Tinggi Lasi Tuo
	Drainase Jalan Posyandu Lubuak Aua
	Drainase Pasar Lasi Simpang Pauah Nagari Lasi
Baso	Drainase dan Trotoar Pasar Koto Baru
	Drainase Komplek Perkantoran Kecamatan Baso
	Trotoar Jalan Ujuang Guguak Anak Aia Nagari Simarasok
	Drainase Jalan Puskesmas Simpang Kampuang Panjang Jorong Tigo
	Drainase Samping Pasar Baso Jorong Baso Nagari Tabek Panjang
Tilatang Kamang	Drainase Jalan Simpang Taman Gadut
Kamang Magek	Drainase Simpang SD Tengah – Tangkamang
	Drainase Kp. Barangkai – Banda Aia Taganang Pauah

	Drainase Simpang Koto Panjang Jorong Koto Panjang Nagari Kamang Hilia
	Drainase Kp. Barangai Jorong Pauh Kamang Mudiak Nagari
Palembayan	Drainase Jalan Sei. Pua Nagari Sei. Pua
	Drainase Jalan depan SMK- Kantor Camat- Simpang Lansano
	Drainase Jalan Pasar Palembayan Jorong Pasar Palembayan Nagari Ampek Koto Palembayan Kec. Palembayan
	Drainase jalan padang datar Jorong pasar palembayan Nagari Ampek Koto Kec. Palembayan

Sumber : Data Olahan Peneliti (Renja DPUTR Kabupaten Agam Tahun 2018-2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar drainase yang ada di Kabupaten Agam berada di Kecamatan Lubuk Basung hal ini dikarenakan Kecamatan Lubuk Basung merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Agam. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan penelitian di Kecamatan Lubuk Basung. Karena selain sebagian besar Kecamatan Lubuk Basung memiliki bangunan drainase terbanyak di Kabupaten Agam berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan sebelumnya juga memperlihatkan bahwa permasalahan drainase paling sering terjadi di Kecamatan Lubuk Basung.

Selain itu berdasarkan data rekap banjir dari BPBD-DAMKAR Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan dengan kasus banjir terbanyak dalam dua tahun terakhir. Selain itu jenis banjir yang diakibatkan oleh drainase paling sering terjadi di Kecamatan Lubuk Basung, hal ini dikarenakan Kecamatan Lubuk Basung merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di

Kabupaten Agam dimana berdasarkan data statistik Kabupaten Agam tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Basung adalah sebanyak 75.979 jiwa.¹⁴

Kepadatan penduduk Kecamatan Lubuk Basung ini lah yang menyebabkan drainase di Kecamatan Lubuk Basung rentan mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan padatnya penduduk akan menyebabkan berkurangnya lahan untuk mendirikan bangunan dan lokasi pembuangan sampah sehingga pada akhirnya drainase akan rusak oleh sampah dan bangunan yang menghalanginya. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase :

“Penyebab seringnya terjadi banjir di Kabupaten Agam disebabkan karena banyaknya dilakukan pengalihan fungsi lahan dan perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke jaringan drainase.” (Wawancara dengan Kasi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah, dan Drainase, pada 13 Oktober 2021)

Selain itu hal ini dibuktikan bahwa daerah yang sering terkena banjir di Kecamatan Lubuk Basung adalah daerah yang padat penduduk yaitu Nagari Lubuk Basung, Nagari Manggopoh dan Nagari Garagahan, dimana dari 75.980 jiwa penduduk di Kecamatan Lubuk Basung pada tahun 2019, terdapat 38.499 jiwa penduduk Nagari Lubuk Basung, 20.364 jiwa penduduk Nagari Manggopoh, dan 7.441 jiwa merupakan penduduk Nagari Garagahan.¹⁵ Dimana dari sepuluh kejadian banjir di Kecamatan Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung mengalami enam kejadian banjir, Nagari Manggopoh mengalami tiga kejadian banjir, dan Nagari Geragahan mengalami satu kejadian banjir. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kondisi drainase di Kecamatan Lubuk Basung. Karena sebagian besar banjir yang terjadi di Kecamatan Lubuk

¹⁴ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2020

¹⁵ Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Lubuk Basung 2020

Basung adalah banjir yang disebabkan oleh kondisi drainase yang mayoritas tersumbat oleh sampah dan tumpukan tanah.¹⁶ Selain itu berdasarkan obeservasi awal peneliti memperlihatkan bahwa drainase di Kecamatan Lubuk Basung kurang terkelola dengan maksimal, diantaranya yaitu :

1. Ketidakterediaan drainase sehingga tidak ada fasilitas pembuangan air hujan dan limbah sehingga menyebabkan genangan, kondisi ini memperlihatkan bahwa kurang baiknya pengelolaan drainase dalam penyelenggaraan pembangunan drainase.
2. Drainase yang dipenuhi oleh sedimen dan sampah sehingga menyebabkan air meluap ke jalan, kondisi ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir.
3. Drainase yang dipenuhi oleh rumput, kondisi ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam pemeliharaannya.
4. Kerusakan pada fisik drainase, kondisi ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase.
5. Aliran yang dihalangi oleh masyarakat untuk pemeliharaan ikan, kondisi ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam penetapan peraturan mengenai drainase.

¹⁶ Harmen.(2021).”Drainase Jadi Masalah Serius di Lubuk Basung, Ruas Jl.Agus Salim Banjir ”, *Kaba12* 9 April 2021 (<http://kaba12.co.id/2021/04/09/drainase-jadi-masalah-serius-di-lubukbasung-ruas-jl-agus-salim-banjir/>)

Gambar 1.3
Kondisi Drainase di Kecamatan Lubuk Basung



Sumber : Hasil Survey Lapangan 31 Oktober 2021

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh DPUTR Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengelolaan drainase di Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Lubuk Basung seperti, program yang belum maksimal, banyaknya masyarakat yang mengeluh, sumberdaya yang belum mencukupi, kurangnya koordinasi, dan kurangnya anggaran untuk pengelolaan drainase.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barnades H Sitohang pada tahun 2017 tentang pengelolaan drainase dari instansi pengelola drainase di daerah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam perbaikan gorong-gorong atau

drainase perencanaan anggaran adalah salah satu hal yang sangat penting, karena tanpa rencana yang tepat organisasi yang bertugas dalam perbaikan drainase ini akan kehilangan fokus dan hanya akan sekedar melakukan daftar keinginan yang harus dilakukan, selain itu jika dalam perencanaan anggaran tidak disesuaikan dengan apa yang diharapkan maka secara otomatis perbaikan gorong-gorong dan drainase tersebut juga tidak akan berjalan dengan optimal. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam pemeliharaan drainase perlu adanya koordinasi struktural dan non struktural yaitu koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.¹⁷

Penelitian yang relevan lainnya adalah penelitian dari Lumettu Jegiftha dkk, mengatakan bahwa sebagai sebuah organisasi publik kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang ditampilkan baik berupa produk, jasa, atau suatu proses.¹⁸

Berdasarkan hal ini muncul pertanyaan bagaimana kinerja DPUTR Kabupaten Agam selama ini sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan drainase di Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Lubuk Basung, apakah disebabkan oleh kurangnya anggaran atau kurang maksimalnya program pengelolaan atau hal lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan kajian lebih lanjut mengenai kinerja DPUTR Kabupaten Agam dalam melakukan pengelolaan drainase. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan

¹⁷ Sitohang, B. H. (2017). Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4).

¹⁸ Jegiftha, L., Gosal, R., & Sambiran, S. (2018). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

penelitian mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Drainase.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja DPUTR Kabupaten Agam dalam mengelola drainase di Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu diantaranya:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan teori-teori Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk tema penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam pengelolaan saluran

drainase. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam pengelolaan drainase, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

